

WARGA BERDAYA SEBAGAI SUBPOLITIK DAN KAMPANYE *JOGJA ASAT*: PENOLAKAN PEMBANGUNAN HOTEL DAN APARTEMEN DI YOGYAKARTA

Jurnal Pengembangan Kota (2021)
Volume 9 No. 1 (85–98)
Tersedia online di:
<http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk>
DOI: 10.14710/jpk.9.1.85-98

Saqib Fardan Ahmada, S. Susetiawan*

Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstrak. Artikel ini berangkat dari kampanye *Jogja Asat* yang digunakan oleh warga berdaya dalam melakukan penolakan hotel dan apartemen di Yogyakarta. Konsep subpolitik milik Ulrich Beck kemudian menjadi pilihan untuk menganalisis kasus tersebut. Dengan uraian di atas, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama yaitu bagaimana proses warga berdaya sebagai fenomena subpolitik menolak atas pembangunan hotel dan apartemen di Yogyakarta melalui kampanye *Jogja Asat*. Proses penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus dengan analisis deskriptif. Penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa warga berdaya merupakan bagian dari realitas subpolitik sebagaimana dijelaskan Ulrich Beck. Subpolitik di sini berangkat dari temuan bahwa warga berdaya bukan merupakan organisasi formal, melainkan sebuah koalisi warga yang juga terhubung dengan organisasi masyarakat sipil lain seperti Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Indonesia *Visual Art Archive* (IVAA), hingga Watchdoc. Melalui kampanye *Jogja Asat*, warga berdaya berusaha melakukan kontra narasi dari kemajuan pariwisata yang ada di Yogyakarta. Pada prosesnya, warga berdaya sebagai subpolitik aktivitasnya tidak hanya sekedar berkampanye tentang *Jogja Asat* saja. Warga berdaya juga turut memberdayakan masyarakat menuju kesadaran kritis terhadap lingkungan dan membangun jejaring dengan berbagai pihak yang mengalami keresahan akibat perkembangan hotel dan apartemen dalam industri pariwisata di Yogyakarta.

Kata Kunci: Subpolitik; Warga Berdaya; Hotel dan Apartemen

[Title: Warga Berdaya as a Subpolitics and *Jogja Asat* Campaign: A Movement Against The Construction of Hotel and Apartment in Yogyakarta]. This article departs from the *Jogja Asat* campaign used by *warga berdaya* in rejecting hotels and apartments in Yogyakarta. The concept of sub-politics by Ulrich Beck was then used to analyze this case. By the description above, the main question of this research is how the process of *warga berdaya*, as a sub politics phenomenon, rejects the construction of hotels and apartments in Yogyakarta through the *Jogja Asat* campaign. The research was conducted with the qualitative method through a case study approach, with descriptive analysis. The results of this study show that *warga berdaya* is a sub politics as Ulrich Beck explained. The sub politics departs from the finding that *warga berdaya* is not a formal organization but rather a coalition of citizens connected to other civil society organizations such as *Wahana Lingkungan Hidup* (WALHI), Indonesia *Visual Art Archive* (IVAA), and Watchdoc. Through the *Jogja Asat* campaign, *warga berdaya* attempts to counter the modernization of tourism in Yogyakarta. In its process, *warga berdaya*, as a sub politics is not only campaigning about *Jogja Asat*. *Warga berdaya* also empowering the community towards critical awareness of the environment and built a network with various actors who experienced unrest due to the construction of hotels and apartments.

Keywords: Subpolitics; Warga Berdaya; Hotels and Apartments

Cara Mengutip: Ahmada, Saqib Fardan., & Susetiawan, S. (2021) Warga Berdaya Sebagai Subpolitik dan Kampanye *Jogja Asat*: Penolakan Pembangunan Hotel dan Apartemen di Yogyakarta. **Jurnal Pengembangan Kota**. Vol 9 (1): 85-98. DOI: 10.14710/jpk.9.1.85-98

1. PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern, salah satunya dicirikan oleh adanya proses industrialisasi.

Pengertian industrialisasi itu sendiri merujuk pada organisasi sosial dan ekonomi dari suatu proses produksi yang diatur untuk merangkai kerja manusia, mesin-mesin, input bahan mentah serta

output produksi dalam satu kinerja (Giddens, 2005). Selain dari pada itu, industrialisasi juga bertaut dengan ciri modernitas lainnya yakni kapitalisme, dengan proses produksi dan didukung oleh teknologi modern, berorientasi untuk pencapaian keuntungan yang lebih besar dalam memproduksi (Kurniawan, 2001). Dalam perjalanannya, industrialisasi menjadi jawaban atas kompleksitas pemenuhan kebutuhan masyarakat modern, akan tetapi industrialisasi juga membawa sebuah eksternalitas negatif. Yuda (2016) menjelaskan bahwa eksternalitas merupakan dampak negatif dari aktivitas ekonomi, yang mendorong kerusakan lingkungan, dimana masyarakat hidup tergantung pada lingkungan itu sendiri.

Proses industrialisasi, yang tujuan utamanya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk kemakmuran masyarakat, dalam realitasnya bukannya kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik, bahkan terjadi sebaliknya, yakni menghasilkan ketimpangan dan ketidakadilan serta meminggirkan masyarakat lokal (Hayat, 2019). Situasi seperti itu banyak dialami oleh masyarakat yang tinggal di kawasan industri. Dampak negatif seperti ini sering menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal. Pada umumnya, studi tentang proses industrialisasi lebih banyak menjelaskan dampak industri ekstraktif yang menimbulkan perlawanan masyarakat lokal. Kehadiran industri ekstraktif di Kalimantan Timur telah memunculkan perlawanan oleh kalangan pemuda setempat meskipun pada akhirnya terjadi kooptasi oleh perusahaan (Simatupang & Swara, 2019). Di Pati, Jawa Tengah, kelompok-kelompok akar rumput bersama-sama dengan komunitas adat setempat (masyarakat Samin), yang menyebut diri mereka 'Sedulur Sikep', menolak dengan tegas setiap bentuk intervensi industrial oleh PT Sahabat Mulia Sakti terhadap kelestarian SDA pegunungan Kendeng Utara (Suharko, 2017).

Namun demikian, dampak negatif dari proses industri tidak selalu terbatas pada industri ekstraktif melainkan juga industri pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata, meski dapat membuka peluang dan kesempatan bekerja bagi masyarakat, namun di satu sisi juga membawa dampak sosial yang merugikan. Beberapa literatur (Tortella & Tirado,

2011; Trisnawati, 2012; Wang & Yotsumoto, 2019) juga turut membahas mengenai dampak industri pariwisata terhadap masyarakat lokal. Wang dan Yotsumoto (2019) menjelaskan bahwa upaya pengembangan industri pariwisata di empat desa di Provinsi Fujian, Cina telah menimbulkan protes yang dilakukan masyarakat lokal. Seperti yang terjadi di Desa Hongkeng, untuk mendapat status warisan dunia, rumah penduduk lokal dibongkar, lahan diambil alih, dan rumah baru tidak boleh dibangun. Tidak berhenti di situ, lebih lanjut proses pengembangan pariwisata ini diikuti oleh adanya konstruksi baru seperti fasilitas komersial, gedung perkantoran, dan infrastruktur yang menyebabkan konflik semakin berlanjut.

Kajian mengenai dampak dari industri pariwisata juga tidak terlepas atas kondisi penyediaan air yang ada di daerah sekitarnya. Kajian ini salah satunya dilakukan di Pulau Mallorca, Spanyol. Tortella dan Tirado (2011) memaparkan bahwa industri pariwisata, meski telah memberi sumbangan besar pada pertumbuhan ekonomi suatu negara, namun di satu sisi juga telah membawa dampak serius pada sektor lingkungan, khususnya pada sumber daya air. Pada kasus di Pulau Mallorca sendiri, berdirinya hotel-hotel telah menimbulkan tekanan pada persediaan air dan pada prosesnya menyebabkan terdapat persaingan dengan masyarakat lokal dalam mendapatkan sumber daya ini. Bisnis pariwisata yang hanya berfokus pada efisiensi tanpa mengambil perspektif yang dapat mengintegrasikan kebutuhan bisnis dan masyarakat lokal menjadi alasan konflik air ini dapat terjadi.

Dalam konteks Indonesia, kajian serupa juga dilakukan dengan melihat dampak pariwisata di Kabupaten Tabanan dan Badung, Provinsi Bali. Trisnawati (2012) menjelaskan bahwa perkembangan pariwisata di Kabupaten Badung dapat ditunjukkan dengan adanya perkembangan

ISSN 2337-7062 © 2021

This is an open access article under the CC-BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>). – lihat halaman depan © 2021

*Email soesetindah@yahoo.com

Diterima 30 Oktober 2020, disetujui 30 Juni 2021

jumlah hotel dan restoran sepanjang tahun 1995 hingga 2010. Dalam prosesnya, perkembangan ini berdampak pada kuantitas air baik itu pada subak maupun air bersih untuk konsumsi. Hal ini kemudian memicu terjadinya sengketa yang dapat terjadi antara berbagai aktor seperti sesama petani, petani dengan pemerintah (PDAM) maupun petani dengan investor (pemilik hotel/restoran).

Hubungan antara industri pariwisata dan dampaknya bagi masyarakat lokal juga tidak lepas dalam konteks perkembangan di Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari aksi warga berdaya pada Bulan Oktober 2014 yang memunculkan kampanye *Jogja Asat* sebagai respon atas masifnya pembangunan hotel dan apartemen di Yogyakarta. Seperti diketahui, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sendiri dikenal sebagai kawasan wisata di Indonesia. Konsekuensi logis yang timbul adalah bahwa sebuah tempat tujuan wisata haruslah menyediakan tempat akomodasi bagi para wisatawan untuk menginap (Sesanti, 2016). Sebagai gambaran, dalam kurun waktu 5 tahun (2012-2017) sebanyak 288 hotel di Yogyakarta telah terbangun (Dinas Pariwisata Daerah Istimewah Yogyakarta, 2017).

Kampanye *Jogja Asat* yang digaungkan warga berdaya pada awalnya berangkat dari peristiwa Hotel Fave yang dianggap menyebabkan sumur warga di sekitarnya kering. Istilah *asat* (Bahasa Jawa), dalam Bahasa Indonesia artinya kering, merupakan gambaran atas apa yang terjadi pada masyarakat sekitar hotel akibat adanya perebutan sumber air (Watchdoc, 2015). *Jogja Asat* menjadi sebuah potret akan ancaman risiko kelangkaan air jika industri pariwisata, yang dalam hal ini hotel dan apartemen terus dibangun tanpa mengindahkan tata kelola lingkungan kota. Berangkat dari uraian tersebut, pertanyaan utama penelitian ini adalah bagaimana proses warga berdaya sebagai fenomena subpolitik menolak atas pembangunan hotel dan apartemen di Yogyakarta melalui kampanye *Jogja Asat*.

Subpolitik

Konsep subpolitik, menurut Skovgaard (2015) berkembang bersamaan dengan munculnya gagasan masyarakat risiko. Gagasan tentangnya lahir dari karya monumental Ulrich Beck yang berjudul *Risk Society: Towards a New Modernity*.

Menurut Beck (2015) saat ini manusia tidak hanya semata-mata memperhatikan pemanfaatan alam untuk memenuhi kebutuhan, melainkan juga memperhatikan masalah-masalah yang diakibatkan oleh perkembangan tekno-ekonomis, yang berisiko merusak lingkungan alam itu sendiri. Kondisi ini terjadi tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai modernisasi oleh Beck. Modernisasi sendiri merujuk pada terjadinya lonjakan rasionalisasi teknologis yang kemudian memberi perubahan karakteristik masyarakat (Beck, 2015). Dalam proses modernisasi ini, kekuatan ekonomi modern jauh lebih merusak lingkungan dari pada ekonomi tradisional. Itulah penjelasan Beck tentang risiko akibat dari modernitas sehingga masyarakat yang hidup pada masa kini digambarkan sebagai masyarakat risiko.

Konsep ini juga dikenal dengan istilah *manufactured risk*, dimana risiko itu diproduksi oleh aktivitas manusia yang memproduksi kerusakan fisik akibat proses industri (Nurshafira, 2018). Di balik kisah sukses kemajuan ekonomi dan kemakmuran, efek yang tidak diinginkan dari modernitas itu sendiri, adalah risiko seperti krisis ekologi yang terakumulasi (Simatupang & Swara, 2019). Scott dalam Chan (2008) mengidentifikasi jika prinsip utama masyarakat industri adalah distribusi barang langka (*scare goods*), maka dalam masyarakat risiko perdebatannya adalah distribusi 'bads' atau risiko.

Fase modernitas yang ditandai oleh adanya masyarakat risiko ini disebut pula oleh Beck sebagai modernitas *refleksif*. Modernitas *refleksif* ialah kondisi dimana agen (individu) semakin berkeinginan untuk bebas dan terlepas dari kungkungan struktur yang ada (Beck, 2015). Dengan keinginannya itu mereka memiliki kemampuan untuk bertindak secara *refleksif*, menciptakan dan mengubah, bukan hanya diri mereka sendiri, melainkan juga masyarakat tempat di mana mereka hidup. Selanjutnya hal ini ditandai munculnya individu maupun kelompok untuk memformulasikan gerakan sosial guna mendorong proses perubahan sosial dengan cara menantang asumsi dan rasionalitas modernitas (Simatupang & Swara, 2019). Ulrich Beck menekankan bahwa masyarakat risiko cenderung menjadi "*self critical society*" dan dia menunjukkan hal ini dengan menjelaskan bagaimana politisi menghadapi protes dari organisasi masyarakat sipil dan bagaimana

korporasi diboikot atas dasar moral dan politik (Skovgaard, 2015). Di sinilah konsep subpolitik itu hadir bersangkutan dengan masyarakat risiko dalam masyarakat modern

Subpolitik dalam pemikiran Beck dibedakan dengan politik secara umum, yang dalam hal ini agen-agen di luar politik formal mampu untuk tampil dalam panggung sosial (Chan, 2008). Subpolitik sendiri juga dapat dimaknai sebagai politik yang diekspresikan di luar sistem politik yang sudah mapan (Lindgren & Linde, 2012). Sistem politik yang sudah mapan dalam konteks ini melekat pada sistem politik formal seperti lembaga eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, agen dalam subpolitik ini merujuk pada aktor-aktor yang bergerak di luar institusi politik formal. Para agen ini dapat dilihat seperti pada kelompok profesional, intelektual, lembaga penelitian, hingga inisiatif warga (Beck, 1997). Selain itu, dalam hal ini bukan hanya agen kolektif saja yang dapat tampil, melainkan juga individu yang bersaing satu sama lain. Ulrich Beck berpendapat bahwa di luar sistem politik formal, sesungguhnya terdapat politik yang selalu muncul di tempat yang baru (Holzer & Sørensen, 2001). Hal ini disebut sebagai politik keseharian yang dapat dilihat melalui kegiatan keseharian dan pilihan orang dalam politik yang informal dalam gerakan sosial. Seperti dijelaskan:

“The concept of subpolitics refers to small-scale, often individual decisions that either have a direct political frame of reference or achieve political significance by way of their aggregation. Narrowly defined, subpolitics thus bears connotations of being placed beneath the nation-state” (Holzer & Sørensen, 2001).

Subpolitik dapat muncul karena sistem politik konvensional secara berulang-ulang memproduksi dan mengakumulasi risiko. Oleh karenanya sistem ini tidak pernah mampu mengatasi risiko yang direproduksi terus menerus dan gagal mewujudkan arena politik yang lebih partisipatif (Beck, 1997). Subpolitik sebagai *the new politics* kemudian hadir dan menuntut proses pembuatan keputusan yang harus dicapai melalui negosiasi dan dialog publik. Subpolitik menantang logika administrasi dari sistem yang kompleks, meskipun tidak selalu mengambil sikap revolusioner. Ia beroperasi di luar

institusi politik yang ada menggunakan jaringan informalnya sendiri (Chan, 2008).

Subpolitik dan Gerakan Sosial Baru

Beberapa studi (Chan, 2008; Holzer & Sørensen, 2001; Skovgaard, 2015) menjelaskan bahwa wajah subpolitik dapat dilihat secara lebih jelas melalui gerakan sosial. Holzer dan Sørensen (2001) menjelaskan bahwa subpolitik sendiri memiliki dua dimensi yang dibedakan dalam bentuk subpolitik aktif dan pasif. Subpolitik pasif merupakan gerakan yang dapat dimaknai sebagai pengikut arus modernisasi. Sedangkan Beck menyoroti apa yang disebut sebagai sisi subpolitik aktif, yaitu kontestasi dari asumsi modernitas oleh aktor di luar sistem politik formal. Hal ini dapat dilihat melalui hadirnya gerakan sosial dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya mereka untuk memberi pengaruh atas kondisi sosial dan politik (Holzer & Sørensen, 2001; Skovgaard, 2015). Konsep ini secara lebih spesifik sejalan dengan ciri khas dari gerakan sosial baru (GSB). Bahwa GSB lebih suka untuk tetap berada di luar saluran politik formal, menggunakan taktik mengganggu dan memobilisasi opini publik untuk mendapatkan pengaruh politik (Sukmana, 2016).

Konsep GSB menurut Sukmana (2016) muncul setelah adanya perubahan karakter gerakan sosial yang muncul di Amerika Utara dan Eropa Barat. Salah satu karakter yang membedakan adalah jika gerakan sosial lama berpusat pada konflik di bidang ekonomi, yang sebagian besar didorong oleh buruh yang terorganisir, GSB cenderung berpusat pada politik identitas dan budaya. Tujuan dari GSB juga tidak selalu berkutat pada distribusi ekonomi melainkan pada upaya perbaikan kualitas hidup. Gerakan-gerakan ini misalnya dapat dilihat dari adanya gerakan perdamaian, gerakan hak-hak gay, gerakan feminis, hingga gerakan peduli lingkungan (Case & Caragata, 2009).

Karakteristik GSB ini menurut Chan (2008) terkait pula dengan apa yang ada dalam konsep subpolitik. *Pertama*, GSB dapat hadir salah satunya sebagai akibat dari meningkatkan *refleksivitas* dan individualisasi, politik konvensional dan pemeliharaan bahwa politisi tidak benar-benar peduli dengan masalah lingkungan. *Kedua*, GSB adalah jaringan yang tersebar dan terfragmentasi

dari kelompok informal atau organisasi formal. GSB menurut Offe dalam Case dan Caragata (2009) juga dikatakan sangat informal, terputus-putus, dan egaliter. Sehingga memungkinkan anggota dari kelompok yang beragam untuk berkumpul tidak dalam organisasi formal, tetapi di saat-saat protes ketika latar belakang mereka yang berbeda disatukan melalui kepentingan yang sama.

Hannigan dalam Case dan Caragata (2009) menjelaskan dalam hal strategi, GSB, khususnya yang bergerak di bidang lingkungan, menggunakan data ilmiah untuk menantang atau memvalidasi klaim dan mempopulerkan isu untuk membuat poin ilmiah lebih dapat diakses, menarik perhatian media dengan membingkai masalah sebagai hal baru dan penting, dan dramatisasi dari masalah dalam istilah simbolik dan visual. Selain itu, para aktivis gerakan lingkungan, menurut Pearsall dan Anguelovski (2016), juga memanfaatkan aksi kolektif lingkungan untuk mendorong partisipasi lokal, di mana para aktivis dan warga lokal berbaris bersama untuk menentang praktik pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mereka menuntut agar proyek yang menyebabkan ketidakadilan lingkungan dicabut (Pearsall & Anguelovski, 2016).

2. METODE PENELITIAN

Sebagaimana pertanyaan penelitian yang telah diformulasikan pada bagian akhir pendahuluan di atas, metode penelitian untuk menjawab pertanyaan tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Penggunaan penelitian kualitatif dipilih karena mampu melihat satu fenomena secara mendalam dan holistik seperti kehidupan masyarakat, fungsionalisasi organisasi, hingga gerakan sosial (Moleong, 2008). Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kasus lebih menunjuk pada hadirnya kelompok warga berdaya, bukan pada fenomena pembangunan hotel dan apartemen. Secara lebih spesifik varian studi kasus memungkinkan peneliti mengkaji fenomena yang kompleks dalam sebuah konteks (Baxter & Jack, 2008). Pendekatan studi kasus menurut Yin dalam Baxter dan Jack (2008) juga dapat digunakan ketika fokus penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” dan pertanyaan “mengapa”.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara terhadap beberapa informan. Penentuan informan dilakukan dengan prinsip *snowball*, yakni melalui informan diperoleh referensi informan lain, begitulah seterusnya hingga informasi yang didapatkan dirasa cukup.

Karena warga berdaya merupakan kelompok yang cair, yang keanggotaannya terdiri dari beberapa individu yang mewakili dirinya sendiri dan ada juga individu yang mewakili lembaga. Oleh karenanya informan dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua tipe yaitu tipe individu mandiri dan tipe individu yang mewakili lembaga/komunitas. Selain dari anggota warga berdaya, informan lain dalam penelitian ini juga diperoleh dari masyarakat lokal yang terdampak pembangunan hotel/apartemen dan yang melakukan perlawanan. Dengan demikian tipologi informan terdiri dari 1) tipologi individu mandiri yang tergabung dalam kelompok warga berdaya (3 orang); 2) individu yang mewakili lembaga atau organisasi yang tergabung dalam warga berdaya (2 orang); 3) individu yang berasal dari masyarakat terdampak pembangunan hotel dan apartemen (3 orang).

Karena proses penentuan informan sendiri berdasarkan teknik *snowball*, maka peneliti memulai wawancara dari individu yang turut aktif pada masa pembentukan warga berdaya yaitu SG. Berawal dari informan ini kemudian peneliti mendapat rekomendasi untuk mewawancarai GR dan AN yang juga termasuk dalam individu yang aktif dalam warga berdaya. Pencarian informan berikutnya atas rekomendasi GR yakni adalah YN yang mewakili komunitas sepeda dan HL yang mewakili Wahana Lingkungan Hidup. Informan terakhir ialah warga lokal yang pernah terdampak hotel/apartemen yakni DK, KN, dan DN.

Proses wawancara informan dilakukan sepanjang bulan Februari – September 2020 dengan lokasi di sekitar Kota Yogyakarta. Untuk memperkaya pembahasan dalam tulisan ini, data sekunder juga digunakan yang diperoleh dari artikel penelitian sebelumnya, laporan, serta berita-berita yang relevan.

Dalam melakukan analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Data yang telah dikumpulkan kemudian ditranskrip, direduksi, dikategorisasi dan terakhir diinterpretasikan dengan kerangka teori yang ada. Hasil dari interpretasi ini yang kemudian akan dinarasikan dalam bagian hasil dan pembahasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hadirnya Warga Berdaya: Keresahan atas Ruang Publik di Yogyakarta

Warga berdaya sendiri tidak muncul dalam ruang yang kosong, ia hadir sebagai reaksi atas apa yang terjadi pada tata kelola kota Yogyakarta. Isu mengenai ruang publik di Yogyakarta menjadi dasar atas keresahan beberapa kelompok di Yogyakarta. Kelompok-kelompok yang menjadi inisiator awal dalam menyuarakan isu ruang publik ini di antaranya adalah para pegiat sepeda dan seniman *street art*. Setiap kelompok tersebut menyuarakan isu masing-masing bertautan dengan kegelisahan atas ruang publik di Yogyakarta.

Bagi para seniman *street art*, kegelisahan mereka tentang ruang publik diawali atas munculnya komersialisasi ruang publik di Kota Yogyakarta. Komersialisasi ruang publik yang dimaksud dapat dilihat dari maraknya *billboard*, baliho, spanduk, reklame di sepanjang ruas jalan di Yogyakarta. Peristiwa yang kemudian cukup memantik para seniman untuk bereaksi adalah ketika salah satu bangunan bersejarah kota, yakni Jembatan Kewek di Jalan Kleringan dikooptasi sebagai media iklan oleh salah satu penyedia jasa telekomunikasi (Mahaswara, 2016).

Dalam perjalanannya, keresahan yang dialami para seniman diikuti pula oleh para pegiat sepeda. Keresahan ini muncul ketika pergantian walikota yang baru akan menghilangkan semangat untuk bersepeda yang sebelumnya telah dibangun melalui Segoe Segawe. Segoe Segawe (*Sepeda Kanggo Sekolah Lan Nyambut Gawe*) secara resmi dihapuskan oleh Haryadi Suyuti (Wali Kota) melalui surat keputusan SE No. 645/57/SE/2012 pada tanggal 7 September 2012. Bagi para pegiat sepeda yang aktif dalam kegiatan *Jogja Last Friday Ride* (JLFR), hal tersebut dianggap sebagai indikasi

terjadinya inkonsistensi komitmen dari walikota baru. Inkonsistensi ini kemudian dikhawatirkan dapat menular ke persoalan ruang publik lain.

“Kebetulan ada situasi yang waktu itu konteksnya terkait dengan sepeda, yaitu dihilangkannya segoe segawe. Hal itu membuat teman-teman pesepeda gelisah terkait komitmen walikota baru tentang isu sepeda.” (YN, 13/07/2020)

Kedua isu tersebut kemudian dapat mempertemukan antara keresahan dari para seniman *street art* dan pegiat sepeda. Momentum seniman *street art* yang sedang memperjuangkan Jembatan Kewek bersamaan dengan para pegiat sepeda yang resah akan dihapuskannya jalur sepeda di jalan. Selain dari adanya irisan isu tentang ruang publik, hubungan antara pegiat sepeda dan seniman *street art* juga terjadi karena terdapat pegiat sepeda yang juga seorang seniman begitu pula sebaliknya. Atas kondisi tersebut, akhirnya terjalin sebuah jejaring antar pegiat sepeda dan seniman *street art* dalam merespon keresahan atas ruang publik tadi.

Jejaring ini kemudian bereaksi atas keresahan tersebut dengan mengadakan kegiatan berupa *merthi kutho* (merawat kota). *Merthi kutho* pertama dilakukan pada tanggal 10 Februari 2013 dengan tajuk “Masyarakat Berdaya Benahi Ruang Kota”. Kegiatan *merthi kutho* yang pertama fokus pada pembenahan ruang tunggu dan jalur sepeda, pembenahan lajur pejalan kaki, dan *resesik* sampah visual. Hal ini dilakukan atas kesadaran akan kurang terkelolanya fasilitas publik yang ada. Kesadaran warga akan ruang publiknya yang kini dihegemoni oleh sekelompok elit, membuat masyarakat bergerak secara swadaya menuntut ruang publiknya (Mahaswara, 2016). Semangat swadaya ini yang kemudian menjadi dasar dari hadirnya warga berdaya.

“Warga berdaya adalah wujud dari semangat swadaya dan swasembada, warga berdaya mencoba untuk mengangkat bagaimana masyarakat tidak selalu bergantung pada pemerintah untuk membenahi apa yang dilihat.” (YN, 13/07/2020)

Melalui kegiatan tersebut jaringan yang hadir dalam warga berdaya semakin luas dengan berbagai isu

mengenai perkotaan lain ikut disuarakan. hal ini tak terlepas dari isu mengenai kelestarian lingkungan yang dikampanyekan warga Berdaya melalui *Jogja Asat*.

3.2 *Jogja Asat*: Respon terhadap Pembangunan Hotel dan Apartemen

Pasca pelaksanaan kegiatan *merthi kutho*, Warga Berdaya (selanjutnya disebut WB) secara konsisten mengkritisi perubahan-perubahan yang terjadi di Yogyakarta terutama yang meyangkut kepentingan bersama dan ruang publik. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari kampanye *Jogja Asat* yang terus digaungkan. Cerita awal mengenai *Jogja Asat* dimulai pada Agustus 2014, ketika warga Kampung Miliran mengeluh mengenai sumur-sumur mereka yang mengering. Warga Miliran yang mengalami kekeringan sumur kemudian menduga bahwa hal tersebut terjadi karena adanya konstruksi dan pengoperasian hotel di dekat kampung mereka. Salah satu warga Kampung Miliran, Dodok Putra Bangsa merespon kejadian ini dengan melakukan aksi teatrikal berupa mandi menggunakan pasir di depan sebuah hotel yang baru saja beroperasi dekat rumahnya.

“Miliran sumurnya asat semua. Makanya ada demo itu karena sumurnya kering. Dan ternyata banyak juga di kampung-kampung lain yang merasakan”
(DK, 13/09/2020)

Pasca aksi teatrikal tersebut, kampanye *Jogja Asat* kemudian muncul sebagai gambaran sumur-sumur warga yang kering akibat adanya pembangunan hotel dan apartemen. Pada Oktober 2014, para seniman *street art* mulai turut menyerukan isu ini dengan melukis mural dengan tajuk *Jogja Asat*. Mereka menggunakan *Jogja Asat* untuk menyoroti penipisan air tanah setelah aksi mandi pasir oleh Dodok di Agustus 2014. Dari kejadian tersebut akhirnya Dodok yang juga sebagai aktivis mulai ikut berjejaring dalam WB yang sebelumnya telah diinisiasi oleh seniman dan pegiat sepeda.

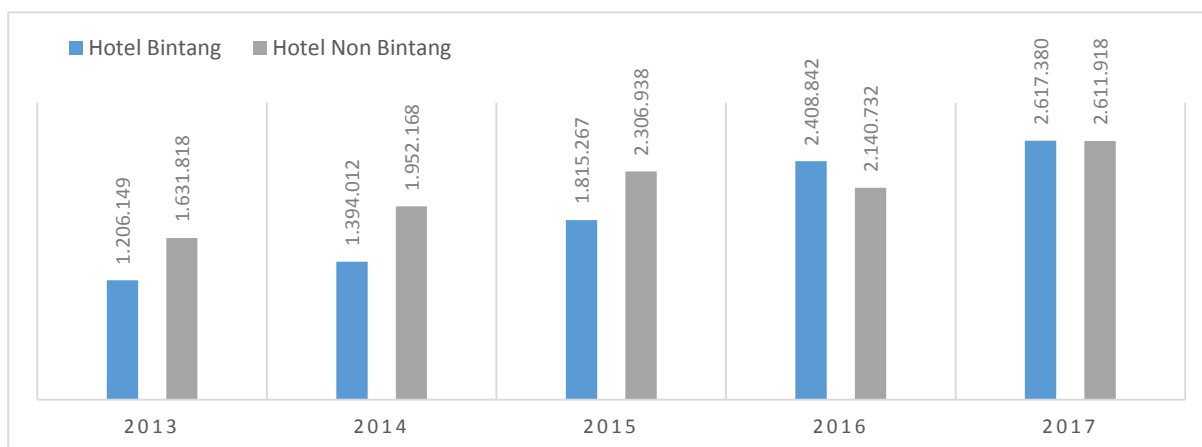
Seperti telah disebutkan sebelumnya, *Jogja Asat* yang digaungkan oleh WB ialah bentuk reaksi atas masifnya pembangunan hotel di Yogyakarta. Berangkat dari kasus keringnya sumur warga di Kampung Miliran, keresahan akan kekeringan ini secara simultan juga diikuti kampung-kampung lain yang merasakan hal serupa.

“Isu kelangkaan air yang digaungkan juga dipilih karena dirasa sangat krusial serta dapat menyentuh seluruh kalangan masyarakat. Ketika sudah berbicara soal air, semua orang akan membutuhkan akses tersebut dan karena hotel-hotel pastinya membutuhkan penyediaan air yang banyak.” (GR, 05/07/2020)

Asat yang artinya habis atau diartikan kering, merupakan suatu peristiwa yang terjadi karena menjamurnya pembangunan hotel di Yogyakarta menyita dan mempersempit ruang publik, meningkatkan kemacetan dan mempersulit penyediaan air, juga menyebabkan beberapa masalah di perkotaan (Yuniar & Efendi, 2018).

Masifnya pembangunan hotel di Yogyakarta yang disuarakan oleh WB bukan tanpa dasar. Sebagai konsekuensi logis atas potensi wisata yang dimiliki, peningkatan jumlah wisatawan yang signifikan diikuti oleh peningkatan jumlah hotel yang signifikan pula. Berdasar pada Buku Statistik Kepariwisata DIY tahun 2017, pada tahun 2012 di Yogyakarta terdapat total 397 hotel dengan rincian 37 hotel berbintang dan 360 hotel non-bintang. Jumlah itu meningkat pada tahun 2017 menjadi total 685 hotel dengan rincian 96 hotel berbintang dan 589 hotel non-bintang. Hal ini tak terlepas pula dari wisatawan yang menggunakan hotel tiap tahunnya. Secara lebih detail data tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Padahal, pada November 2013 sendiri Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan moratorium (penangguhan sementara) izin segala jenis hotel pada periode Januari 2014 hingga Desember 2016. Hanya saja, izin yang dikeluarkan pemerintah pada periode sebelum Januari 2014 tetap dapat dilaksanakan (Suharko, 2020). Hal ini yang menurut Sesanti (2016) menyebabkan aturan moratorium hotel adalah pelaksanaan aturan setengah hati. Ini dikarenakan investor banyak yang memanfaatkan situasi sebelum regulasi moratorium pembangunan hotel diberlakukan, dengan cara mengajukan izin pembangunan hotel sebelum tanggal 1 Januari 2014. Hal ini bagi WB semakin menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta tidak serius dalam menangani persoalan pertumbuhan hotel dan memilih untuk bergerak melalui cara-cara informal.



Gambar 1. Grafik Jumlah Wisatawan di DIY yang Menggunakan Akomodasi Hotel
Sumber: Statistik Keistimewaan DIY 2017

Apa yang disuarakan oleh WB mengenai ancaman kelangkaan air di Yogyakarta akibat pembangunan hotel bukan tanpa dasar. Beberapa studi [Amrta Institute \(2017\)](#) dan [Sesanti \(2016\)](#) kemudian menjelaskan mengenai fenomena ini. [Sesanti \(2016\)](#) menjelaskan bahwa makin banyaknya pembangunan hotel di Yogyakarta akan selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan air untuk menyuplai kebutuhan hotel. Akibatnya, ancaman terhadap berkurangnya air akan selalu menjadi hal utama yang wajib dicarikan pemecahannya. Yogyakarta sendiri mempunyai alam yang dapat mencukupi kebutuhan warganya, inilah yang disebut sebagai “kemampuan alam” untuk melayani masyarakatnya. Akan tetapi “kemampuan alam” ini tentu akan mempunyai batas pelayanan. Dalam konteks pembangunan hotel, kemampuan alam untuk mencukupi kebutuhan air warganya tentu dapat terganggu ketika beroperasinya hotel-hotel yang notabene membutuhkan ketersediaan air yang banyak. Kebutuhan air untuk satu kamar hotel, yakni dua kali (2x) 160 liter, sedangkan kebutuhan air warga hanya 120 liter. Maka dari itu, permasalahan ketersediaan air akan muncul ketika pembangunan hotel dilakukan di dekat pemukiman warga yang padat.

Senada dengan penjelasan tersebut, studi yang dilakukan [Amrta Institute \(2017\)](#), menjelaskan bahwa beberapa kecamatan di Yogyakarta telah mengalami defisit air bersih. Kecamatan tersebut di antaranya adalah Gondokusuman, Mergangsan, Mantrijeron, Jetis, dan Umbulharjo. Defisit ini tentu akan lebih parah ketika ditambah dengan adanya operasional hotel-hotel. Dengan modal besar, hotel dapat membangun sumur dengan daya sedot yang besar di saat warga hanya mengandalkan sumur dangkal yang semakin surut jika terdapat hotel di dekatnya. Dari kondisi tersebut, laporan ini menemukan bahwa survei dari warga yang tinggal di sekitar hotel (jarak 1- 5 meter), 74% di antaranya merasakan adanya dampak negatif.

Fakta-fakta tersebut semakin memantapkan perjuangan WB dalam menyuarakan kampanye *Jogja Asat*. WB berupaya melakukan penyadaran publik akan ancaman kelangkaan air yang akan terjadi jika pembangunan hotel dan apartemen terus dilakukan. Berbagai cara dilakukan WB dalam upaya penyadaran publik ini. Berdasar data yang telah terkumpul, penulis kemudian membaginya ke dalam tiga hal.

1. Membangun jejaring
 Seperti dijelaskan sebelumnya, WB bukanlah sebuah kelompok dengan keanggotaan yang kaku.

WB sendiri merupakan sebuah jejaring yang cair dan dapat diisi oleh siapa saja dengan perannya masing-masing. WB mengacu pada dirinya sendiri sebagai koalisi 'cair', dalam arti bahwa itu tidak diatur secara hierarkis dengan ketat. Setiap warga negara yang ingin terlibat dalam upaya peningkatan kualitas hidup di Yogyakarta diizinkan untuk bergabung (Suharko, 2020). Jejaring yang telah terbentuk antara pesepeda dan seniman *street art* dalam prosesnya terus meluas dengan berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Fenomena tentang keringnya sumur warga telah mengangkat kekuatan berbagai elemen di Yogyakarta. Mulai dari seniman, aktivis, mahasiswa, akademisi, komunitas, dan antropolog budaya berkumpul dan saling membantu untuk menggaungkan kampanye *Jogja Asat* (Yuniar & Efendi, 2018). Jejaring yang luas ini kemudian saling berbagi peran dalam melakukan organisir gerakan.

"Pembagian peran yang dilakukan misalnya seperti Walhi yang berperan dalam edukasi mengenai lingkungan, IVAA yang berperan dalam pendokumentasian dan pengarsipan WB, serta Watchdoc yang membantu dalam pembuatan dokumenter mengenai isu kelangkaan air." (HL, 18/09/2020)

Dalam konteks membangun jejaring, kehadiran WB juga tidak terlepas dari hadirnya warga kampung yang mempunyai keresahan di lingkungannya. Jejaring yang cair ini merupakan bentuk keberdayaan dan kemandirian masyarakat Yogyakarta dalam menyikapi dan mengatasi masalah secara mandiri.

2. Pemanfaatan media

Selain membangun jejaring, WB juga memanfaatkan berbagai media dalam menyuarakan *Jogja Asat*. Pemanfaatan media ini dilakukan agar masyarakat umum yang awam mudah mengerti dengan apa yang disampaikan WB. Ancaman mengenai risiko kekeringan di Yogyakarta yang kompleks dikemas WB dengan cara-cara yang mudah dimengerti. Di antara cara-cara tersebut salah satunya adalah pembuatan film dokumenter yang berjudul "Belakang Hotel". Dokumenter yang diproduksi pada akhir 2014 ini berusaha mengangkat cerita-cerita tentang kompetisi perebutan air tanah antara warga dan industri pariwisata di Yogyakarta (Watchdoc, 2015).

Proses pembuatan film "Belakang Hotel" dikerjakan secara kolaboratif antara Watchdoc dengan para jurnalis dan pegiat sosial yang terhimpun dalam gerakan WB. Selain diunggah melalui kanal Youtube, "Belakang Hotel" juga diputar di kampung-kampung serta kampus-kampus sebagai pengantar diskusi. Proses pemutaran secara langsung dan diskusi ini dilakukan sebagai upaya untuk membangun jejaring yang semakin luas lagi.

"Film itu [Belakang Hotel] menjadi strategi preseden bahwa hotel akan mengancam warga kampung." (DK, 13/09/2020)

Selain pembuatan film dokumenter, WB juga turut melakukan kampanye melalui seni mural. Seni mural ini juga dilakukan atas hadirnya peran dari para seniman *street art* dalam WB. Berbeda dengan dokumenter "Belakang Hotel" yang menjelaskan kondisi kelangkaan air di Yogyakarta secara detail, seni mural yang dibuat para seniman berisi pesan-pesan singkat dan padat. Beberapa kalimat yang digunakan dalam seni mural antara lain seperti "Jogja Istimewa Hotelnya", "Jaga Kampung, Jauhi Serakah Tanah!" dan "Miliran Sumure Asat Dicolong Hotel Fave". Kegiatan membuat mural secara bersama-sama ini diadakan pada 14 Oktober 2014 di Jembatan Kewek Yogyakarta. Pemilihan Jembatan Kewek sebagai tempat potret dilakukan karena Jembatan Kewek letaknya strategis di tengah kota.

3. Mendorong partisipasi masyarakat

Dalam menggaungkan *Jogja Asat*, WB selalu berupaya untuk mendorong partisipasi dari masyarakat lokal. Hal ini tidak lepas dari upaya WB dalam menghubungkan inisiatif warga dari berbagai daerah di Yogyakarta. Prinsip WB dalam mendorong partisipasi masyarakat ini adalah bagaimana warga bisa memperjuangkan apa yang akan dicapai untuk lingkungannya masing-masing dengan tetap dinaungi WB agar inisiatif tersebut dapat saling terhubung. Dengan demikian, aktivis-aktivis kampung akan tetap ada namun kemudian terdapat *support system* di tingkat lebih atas untuk dapat menghasilkan energi yang lebih besar (Mata Najwa, 2015). Selain itu, WB juga berpegang pada prinsip untuk menjadikan masyarakat lokal sebagai subjek yang menentukan keputusan. WB selalu berupaya bahwa aktor utama dalam melakukan proses penolakan hotel dan apartemen adalah dari

masyarakat terdampak itu sendiri. Ketika masyarakat telah membuat keputusan untuk melakukan perlawanan, maka WB akan memberikan dukungan sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat tersebut.

Bentuk-bentuk *support system* yang diberikan WB terhadap perjuangan yang ada di kampung-kampung juga beragam. Pemutaran dokumenter “Belakang Hotel” menjadi cara yang diandalkan WB untuk memberi dukungan pada masyarakat. Film dokumenter tersebut menjadi media yang semakin memunculkan keresahan masyarakat terhadap dampak pembangunan hotel. Dari kegelisahan tersebut WB akan mendukung dengan memberi keyakinan pada masyarakat. Selain itu, WB juga dapat memberi dukungan dengan jaringan yang telah dibangun seperti mencari wartawan, mengundang akademisi atau ahli.

“Support yang kita berikan paling cuma diskusi saja, minta riset, cari wartawan, kita undang akademisi yang ahli. Pengalaman WB mempelajari betul prosedur mendirikan hotel.” (DK, 13/09/2020)

Beberapa cerita masyarakat lokal dalam melakukan penolakan hotel tersebut kemudian akan diuraikan dalam pembahasan berikutnya.

3.3 Perlawanan Warga Lokal

Cerita perlawanan masyarakat lokal terhadap hotel dan apartemen dapat dilihat salah satunya dari kasus Miliran. Namun sebelum peristiwa itu, warga RT 01, RW 01 Karangwuni, Kalurahan Depok, Kecamatan Depaok Sleman, juga turut melakukan penolakan terhadap pembangunan apartemen yang akan dibangun di sekitar pemukiman mereka. Hal ini bermula pada 25 Oktober 2013 ketika PT Bukit Alam Permata melakukan sosialisasi dengan warga Karangwuni terkait pembangunan kost eksekutif. Warga ring-1 yang merasa janggal akibat tidak transparannya kegiatan sosialisasi tersebut kemudian melakukan pertemuan internal di salah satu rumah warga pada 1 November 2013. Kesimpulan dalam pertemuan tersebut adalah bahwa warga ring-1 dari lokasi rencana pembangunan menolak berdirinya bangunan apartemen karena khawatir jika apartemen berdiri akan menggunakan air tanah dalam sehingga sumur

warga akan mengering (Putsanra, 2017). Pada awal 2014, warga yang kemudian menamakan diri sebagai Paguyuban Warga Karangwuni Tolak Apartemen Utara (PWKTAU) membuat petisi penolakan kepada pejabat Kabupaten Sleman dan melayangkan surat protes kepada GKR Emas sebagai tokoh perempuan di legislatif (PWKTAU, 2014).

Melihat pembangunan apartemen yang terus berlangsung, akhirnya pada 29 April 2014 warga melakukan demonstrasi di sekitar lokasi pembangunan. Pasca aksi tersebut, beragam upaya warga berjuang baik melalui ranah formal maupun informal terus dilakukan. WB melalui jaringan yang dimiliki turut memberi dukungan pada PWKTAU. Hal yang dilakukan salah satunya adalah WB bersama Walhi melakukan pemetaan muka air tanah. Hal ini ditujukan untuk melihat perkembangan muka air tanah sejak adanya pembangunan Apartemen Utara. Hal yang dilakukan lainnya adalah melakukan edukasi masyarakat mengenai cara membaca dokumen AMDAL. Proses edukasi tersebut kemudian akan dilanjutkan pada diskusi dengan warga untuk menentukan langkah-langkah berikutnya.

“Di Karangwuni dilakukan pemetaan muka air tanah utk melihat posisi muka air tanah. Kita juga bisa mencari data ada pemantauan secara berkala kita akses ke pemerintah. Kita lihat perkembangan muka air tanah. Data itu yang kita diskusikan bersama masyarakat.” (HL, 18/09/2020)

Kasus penolakan apartemen oleh masyarakat tidak berhenti pada kasus Karangwuni saja. Di Balirejo, Timoho, Yogyakarta warga lokal turut melakukan penolakan pembangunan Apartemen Puri Notoprojo oleh PT Abyudaya Tata Anugrah Mandiri Viglosia Building. Lokasi tersebut semula akan dibangun dengan nama Majestic Grand Bale namun gagal akibat kurang persyaratan izin (Putsanra, 2017). Alasan warga RW 05 menolak pembangunan tersebut didasarkan pada banyak pertimbangan yang dikategorikan dalam dampak lalu lintas, dampak sosial, serta dampak fisik. Ketiga dampak tersebut dicontohkan seperti akan terjadinya kemacetan, pergaulan bebas akibat penyalahgunaan apartemen, serta penurunan air sumur seperti di Miliran. Atas dasar tersebut, warga

RW 05 Balirejo memutuskan beberapa sikap atas pembangunan Apartemen Notoprojo. *Pertama*, menolak rencana pembangunan apartemen lantaran tidak ada manfaat bagi warga. *Kedua*, melarang keras ketua RT di wilayah RW 05 untuk membubuhkan tanda tangan dan cap/stempel atas surat izin rencana pembangunan apartemen. *Ketiga*, tidak mengakui jika ada surat yang ditandatangani oknum yang mengatasnamakan pengurus RT atau RW.

Berangkat dari sikap tersebut warga kemudian melakukan beberapa langkah mulai dari membuat petisi penolakan kepada Walikota Yogyakarta, pemasangan spanduk-spanduk penolakan, hingga melakukan audiensi dengan Forum Pemantau Independen (FORPI) Kota Yogyakarta. Aktivis WB dan WALHI kemudian turut mendampingi proses penolakan ini.

“Mereka [Warga Berdaya] memberi dukungan dengan mencari link kepada pihak terkait seperti Walhi” (DN, 17/09/2020).

Hampir sama dengan Karangwuni, keterlibatan WB pada kasus Balirejo juga tidak secara langsung layaknya yang terjadi di Kampung Miliran. Keterlibatan aktivis WB membuat komunikasi warga dan WALHI menjadi semakin mudah dilakukan. WALHI dalam proses pendampingan penolakan tersebut dijadikan warga sebagai aktor intelektual yang mengerti akan isu lingkungan. Seperti memberi penjelasan ilmiah mengenai terjadinya air surut akibat adanya pembangunan apartemen.

3.4 Warga Berdaya: Sebuah Fenomena Subpolitik

Berbagai aksi yang telah dilakukan WB tidak lepas dari apa yang sedang terjadi di Yogyakarta sebagai sebuah *risk society*. Proses modernisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan kemakmuran yang ada di dalamnya, sebenarnya memiliki efek samping yang tidak diinginkan (baca: risiko). Hal ini dapat dilihat dari proses pembangunan sektor pariwisata yang terjadi di Yogyakarta, yang secara linier diikuti pula oleh adanya pembangunan hotel dan apartemen yang masif. Keringnya sumur-sumur di Kampung Miliran akibat adanya pembangunan hotel di dekat wilayahnya telah memunculkan keresahan warga akibat dari tuntutan modernitas. Tidak berhenti

pada kasus Miliran saja, kampung-kampung lain seperti Karangwuni dan Balirejo yang mengalami kondisi serupa juga turut merasakan keresahan yang sama. Adanya pembangunan dan operasional hotel/apartemen di lingkungan mereka akan menyebabkan kelangkaan air. Kondisi demikian menunjukkan ketidakmampuan sistem politik konvensional yang selama ini ada dimana sistem politik formal yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Yogyakarta, tidak mampu menghentikan risiko yang akan diterima oleh masyarakatnya, bahkan ada kecenderungan mengakumulasi risiko yang semakin besar demi kepentingan perkembangan ekonomi untuk menunjukkan indikasi modernitas.

Kehadiran WB di tengah masyarakat menunjukkan sebuah masyarakat atau komunitas modern yang reflektif. Kehadirannya ingin membebaskan belenggu struktural yang diciptakan oleh sistem politik formal dan mendorong sebuah proses perubahan situasi yang diciptakan oleh sistem politik tersebut. Ketidakpercayaan WB kepada Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya dalam isu mengenai moratorium hotel yang dinilai hanya formalitas belaka menjadi keyakinan WB untuk bergerak melalui saluran politik lain. Inilah sebuah kekuatan politik baru yang bersifat informal, hadir di tengah masyarakat atas kepedulian terhadap semakin tingginya risiko yang akan ditanggung oleh masyarakat, manakala sistem politik konvensional tidak lagi mampu membendung risiko bahkan berkoalisi dengan para pemilik kapital yang terus mereproduksi risiko kerusakan lingkungan yang menguntungkan pemilik kapital.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, subpolitik ditunjukkan oleh dua kategori. Subpolitik pasif merujuk kelompok masyarakat atau individu yang mendukung struktur atau tidak peduli apapun yang terjadi, sedang subpolitik aktif ditunjukkan dengan reaksi terhadap proses politik yang mendorong hadirnya residu dari proses modernisasi, yaitu risiko. WB merepresentasikan kategori kedua yang bersifat kritis dari apa yang dihasilkan oleh modernisasi dengan melakukan penolakan terhadap pembangunan hotel dan apartemen di Yogyakarta.

Sebagai subpolitik aktif, WB juga membangun kesadaran masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat di mana masyarakat

memiliki hak yang sama dengan para pengusaha dalam mengakses kebutuhan air bersih. Kesadaran hak inilah menjadi harapan WB demi terbangunnya subpolitik yang lebih besar dan masyarakat tidak hanya digilas untuk kepentingan sekelompok orang yang hanya berpikir tentang kepentingan ekonomi yang menjauhkan diri dari keseimbangan ekologi dalam kehidupan ruang perkotaan.

Subpolitik yang dikonseptualisasikan oleh Beck (2015) di atas, sebagaimana menekankan pada upaya menantang logika modernitas yang hanya menciptakan risiko. WB melalui berbagai proses yang telah dilakukannya dalam menentang pembangunan hotel dan apartemen, semula hanya sekumpulan orang yang berkegiatan seni dan hiburan telah bertransformasi menjadi sebuah subpolitik, kritis dan bernuansa prinsip kemanusiaan. WB menentang logika pembangunan hotel dan apartemen sebagai sektor yang akan mendukung pengembangan pariwisata di Yogyakarta. Dukungan berbagai organisasi masyarakat sipil (*civil society organization*) antara lain seperti WALHI karena isu yang dibawa WB sejalan dengan isu yang disuarakan oleh pada umumnya Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdapat di Yogyakarta. Setiap organisasi formal yang tergabung saling mengisi dan membagi peran dan fungsinya sehingga berkembang menjadi gerakan sosial yang memiliki makna politik karena kritik yang disuarakan tidak hanya pada unit bisnis melainkan juga terhadap pemerintah dan sistem politik secara formal.

Seiring berjalannya waktu, WB juga melakukan pemberdayaan kepada masyarakat lokal, melakukan pengorganisasian masyarakat lokal yang mengalami keresahan atas pembangunan hotel dan apartemen. WB juga membangun partisipasi masyarakat lokal agar mampu memperjuangkan kepentingan di lingkungannya masing-masing. WB memiliki prinsip agar bisa menjadi naungan dari aktivisme yang ada di kampung-kampung dengan memberi *support system* sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bentuk-bentuk dukungan WB dalam melakukan pengorganisasian masyarakat pun juga bermacam-macam. Berdasar data yang terkumpul, masyarakat memposisikan WB sebagai “aktor intelektual” yang mampu

menjawab keresahannya. Dalam kasus pembangunan hotel dan apartemen, beberapa hal yang dilakukan WB diantaranya adalah melakukan riset mengenai air dalam, edukasi soal AMDAL, berdialog dengan masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek dalam menentang ketidakadilan yang berlangsung.

Sebagai subpolitik, WB memiliki kekuatan politik yang bukan partisan, yaitu anggota masyarakat baik secara individual maupun mereka yang tergabung dalam organisasi formal sebagai *civil society organization* dan didukung oleh media baik media baru (elektronik) maupun cetak.

WB merupakan kelompok yang sangat informal dan egaliter. Dalam konteks ini, berbagai individu atau komunitas yang memiliki latar belakang beragam bersama-sama bergabung dan bergerak dalam merespon *Jogja Asat*, sebagai isu lingkungan, ketidakadilan dan dehumanisasi. Sebagai GSB, WB menjadikan dirinya bukan sebuah kelompok dengan keanggotaan yang kaku dan tanpa hierarki. WB merupakan pergerakan dengan keanggotaan yang melintasi kategori-kategori sosial ikhwal gender, pendidikan, atau kelas. Dengan demikian, pergerakan WB menekankan peran tiap aktor dalam jaringan alih-alih pada peran struktur organisasi yang kaku. WB adalah jaringan yang tersebar dan terfragmentasi dari kecil hingga kelompok informal atau organisasi formal, yang menonjolkan ciri kemandirian atau keberdayaan. GSB merupakan alat bekerjanya subpolitik untuk mengartikulasikan kepentingan politik warga.

4. KESIMPULAN

Tulisan ini membahas bagaimana proses warga berdaya sebagai fenomena subpolitik menolak atas pembangunan hotel dan apartemen di Yogyakarta. Dengan mengambil kasus mengenai kampanye *Jogja Asat*, penelitian ini menunjukkan bahwa WB telah menjadi sebuah subpolitik. Subpolitik, merujuk pada Beck (2015) merujuk pada sebuah fenomena di mana terdapat kelompok masyarakat sipil yang menentang arus dari modernisasi akibat risiko yang ditimbulkannya. Pada masyarakat risiko di mana segala ancaman dan bahaya yang ada merupakan akibat dari ulah manusia sendiri, para

agen ini kemudian mencoba bergerak untuk menentang narasi kemajuan dan kemakmuran yang dihadapkannya. Hal inilah yang dilakukan WB melalui kampanye *Jogja Asat* yang memilih bergerak secara informal di luar sistem politik konvensional. Namun demikian, apa yang dilakukan WB tidak berhenti pada menyuarakan mengenai *Jogja Asat* saja, WB pada prosesnya juga melakukan penyadaran kepada masyarakat terdampak. Secara lebih rinci intisari dari temuan pada penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, munculnya slogan *Jogja Asat* yang digaungkan WB atas dasar keringnya sumur-sumur warga kampung akibat adanya hotel/apartemen. Atas kondisi tersebut WB membawa narasi "*Jogja Asat*" sebagai sebuah kampanye kepada publik di Yogyakarta. Kedua, berbagai langkah yang dilakukan WB antara lain dengan membuat film dokumenter "Belakang Hotel" dan mural di jalanan di Yogyakarta. Meski demikian, pesan-pesan yang bersifat saintifik tetap disampaikan untuk menjadi bukti atas apa yang telah dilakukan oleh WB. Ketiga, aksi-aksi yang dilakukan WB tidak berhenti pada menyuarakan saja. WB juga melakukan pemberdayaan pada kampung-kampung yang telah berjejaring dengannya. Jejaring antar individu dan komunitas di WB yang memungkinkan hal ini dapat terjadi. Keempat, sebagai koalisi yang tidak kaku, WB lebih menekankan pada peran tiap individu atau kelompok di dalamnya sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan tidak diatur oleh pembagian fungsi yang ketat, pergerakan WB justru dilakukan oleh aktor-aktor yang ada di dalamnya secara informal. Seluruh proses yang telah dilakukannya menjadi sebuah gambaran bagaimana proses subpolitik itu bekerja.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amrta Institute (Producer). (2017, 22 Maret). Jogja Darurat Air, Laporan Amrta Institute Untuk Hari Air Sedunia Tahun 2017. *Amrta Institute*. Retrieved from https://issuu.com/tifaoundation/docs/jogja_darurat_air_-_laporan_amrta_i
- Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers. *The Qualitative Report*, 13(4), 544–559. Doi: <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2008.1573>
- Beck, U. (1997). Subpolitics: Ecology and The Disintegration of Institutional Power. *Organization & Environment*, 10(1), 52-65. Doi: <https://doi.org/10.1177%2F0921810697101008>
- Beck, U. (2015). *Masyarakat Risiko: Menuju Modernitas Baru*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Case, R., & Caragata, L. (2009). The Emergence of A New Social Movement: Social Networks and Collective Action on Water Issues in Guelph, Ontario. *Community Development*, 40(3), 247-261. Doi: <https://doi.org/10.1080/15575330903091738>
- Chan, R. K. (2008). Risk, Reflexivity and Sub-Politics: Environmental Politics in Hong Kong. *Asian Journal of Political Science*, 16(3), 260-275. Doi: <https://doi.org/10.1080/02185370802504308>
- Dinas Pariwisata Daerah Istimewah Yogyakarta. (2017). Statistik Kepariwisata 2017. from Dinas Pariwisata Daerah Istimewah Yogyakarta <https://visitingjogja.com/15691/statistik-pariwisata-diy-2017/>
- Giddens, A. (2005). *Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Hayat, M. (2019). Kebijakan Pertumbuhan Industri dan Munculnya Masyarakat yang Anomi. *Jurnal Sosial Politik*, 2(1), 71-84. Doi: <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4757>
- Holzer, B., & Sørensen, M. (2001). Subpolitics and Subpoliticians *Arbeitspapier 4 des SFB 536 Reflexive Modernisierung*.
- Kurniawan, N. I. (2001). Melacak Pemikiran Anthony Giddens tentang Nation-State dan Modernitas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 4(3), 341-364.
- Lindgren, S., & Linde, J. (2012). The Subpolitics of Online Piracy: A Swedish Case Study. *Convergence*, 18(2), 143-164. Doi: <https://doi.org/10.1177%2F1354856511433681>
- Mahaswara, H. A. (2016). Menggugat Ruang Publik Melalui Gerakan Masyarakat (Studi Kasus

- Gerakan Warga Berdaya di Yogyakarta). *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3(2), 26-39. Doi: <https://doi.org/10.22146/jps.v3i2.23534>
- Mata Najwa (Producer). (2015). *Penyeru Perlawanan*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=LsxXC5SSa9I>
- Moleong, L. J. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurshafira, T. (2018). Mainstreaming Modernisation Risk Politics in Indonesia's Democratisation: Towards Public Control of Welfare and Risk in Expanding Water Access. *PCD Journal*, 6(2), 271-304. Doi: <https://doi.org/10.22146/pcd.35411>
- Pearsall, H., & Anguelovski, I. (2016). Contesting and Resisting Environmental Gentrification: Responses to New Paradoxes and Challenges for Urban Environmental Justice. *Sociological Research Online*, 21(3), 121-127. Doi: <https://doi.org/10.5153%2Fsro.3979>
- Putsanra, D. V. (2017). Warga Yogya Menolak Pembangunan Hotel dan Apartemen, *tirto.id*. Retrieved from <https://tirto.id/warga-yogya-menolak-pembangunan-hotel-dan-apartemen-csjG>
- PWKTAU. (2014). Tolak Apartemen Utara. Retrieved from <https://tolakapartemenuttara.tumblr.com/>
- Sesanti, A. D. (2016). *Jogja-Ku (Dune Ora) Didol. Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta*. Yogyakarta: STPN Press.
- Simatupang, E., & Swara, V. Y. (2019). Membaca Arena Baru Subpolitik Anak Muda dalam Memaknai Risiko Industri Ekstraktif. *Jurnal Studi Pemuda*, 8(2), 99-112. Doi: <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.48429>
- Skovgaard, J. (2015). Subpolitics and the Campaign against Barclays' Involvement in South Africa. *Moving the Social*, 54, 37-58. Doi: <https://doi.org/10.13154/mts.54.2015.37-58>
- Suharko, S. (2017). Masyarakat Adat versus Korporasi: Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah Periode 2013-2016. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20(2), 97-116. Doi: <https://doi.org/10.22146/jsp.24776>
- Suharko, S. (2020). Urban Environmental Justice Movements in Yogyakarta, Indonesia. *Environmental Sociology*, 6(3), 231-241. Doi: <https://doi.org/10.1080/23251042.2020.1778263>
- Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*: Intrans Publishing.
- Tortella, B. D., & Tirado, D. (2011). Hotel Water Consumption at A Seasonal Mass Tourist Destination. The Case of The Island of Mallorca. *Journal of environmental management*, 92(10), 2568-2579. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2011.05.024>
- Trisnawati, H. (2012). Dampak Perkembangan Infrastruktur Pariwisata Terhadap Konflik Air di Kabupaten Badung dan Tabanan. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 2(1), 109-222.
- Wang, L., & Yotsumoto, Y. (2019). Conflict in Tourism Development in Rural China. *Tourism Management*, 70, 188-200. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.08.012>
- Watchdoc (Producer). (2015). *Belakang Hotel*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=mGwS78pMPmU>
- Yuda, T. K. (2016). Memaknai Ulang Corporate Social Responsibility: Upaya Mewujudkan Fair Responsibility. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(3), 200-217. Doi: <https://doi.org/10.22146/jsp.15680>
- Yuniar, R., & Efendi, D. (2018). Art and Urban Politics: Social and Political Impact of 'Underground' Movement toward Neoliberal Development in Yogyakarta, Indonesia *Shifting Undergrounds in East and Southeast Asia: Transformations and Declinations of Cultural Self-Expressions and Communities in Cityscape* (pp. 1-19). National University of Singapore.